

**HUBUNGAN IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN
DINAS SOSIAL DENGAN PENINGKATAN TINGKAT
PENDIDIKAN DI DESA TANJUNG KESUMA
KECAMATAN PURBOLINGGO
KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR**

(Skripsi)

Oleh

Sekar Ayu Palupi



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

HUBUNGAN IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DINAS SOSIAL DENGAN PENINGKATAN TINGKAT PENDIDIKAN DI DESA TANJUNG KESUMA KECAMATAN PURBOLINGGO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Oleh
Sekar Ayu Palupi

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan hubungan implementasi Program Keluarga Harapan Dinas Sosial dengan peningkatan tingkat pendidikan di Desa Tanjung Kesuma Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan jenis asosiatif. Populasi dan sampel dalam penelitian ini 33 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan Angket dan analisis data menggunakan Chi Kuadrat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: terdapat hubungan implementasi program keluarga harapan dinas sosial dengan tingkat pendidikan di desa Tanjung kesuma kecamatan purbolinggo Kabupaten lampung timur. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat keberhasilan implementasi Program Keluarga Harapan maka semakin tinggi peningkatan tingkat pendidikan di Desa Tanjung Kesuma.

Kata kunci: Implementasi, Program Keluarga Harapan, Tingkat Pendidikan

**HUBUNGAN IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN
DINAS SOSIAL DENGAN PENINGKATAN TINGKAT
PENDIDIKAN DI DESA TANJUNG KESUMA
KECAMATAN PURBOLINGGO
KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR**

Oleh

SEKAR AYU PALUPI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN

Pada

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi : **HUBUNGAN IMPLEMENTASI PROGRAM
KELUARGA HARAPAN DINAS SOSIAL
DENGAN PENINGKATAN TINGKAT
PENDIDIKAN DI DESA TANJUNG KESUMA
KECAMATAN PURBOLINGGO KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR**

Nama Mahasiswa : **Sekar Ayu Palupi**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1213032072

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan : Pendidikan IPS

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Drs. Holilulloh, M.Si.
NIP 19610711 198703 1 003

Pembimbing II

Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.
NIP 19820727 200604 1 002

2. Mengetahui

Ketua Jurusan
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Drs. Zulkarnain, M.Si.
NIP 19600111 198703 1 001

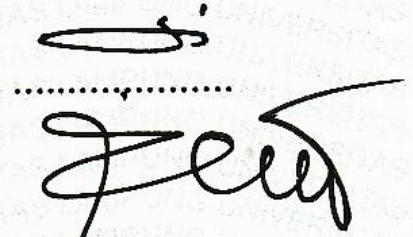
Ketua Program Studi
Pendidikan PKn

Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.
NIP 19820727 200604 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

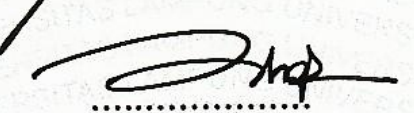
Ketua : **Drs. Holilulloh, M.Si.**

.....


Sekretaris : **Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.**

.....

Penguji
Bukan Pembimbing : **Dr. Adelina Hasyim, M.Pd.**


.....

2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Dr. Muhammad Fuad, M.Hum.
NIP. 19590722 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **20 Juli 2016**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, adalah:

Nama : Sekar Ayu Palupi
NPM : 1213032072
Prodi/Jurusan : PPKn/Pendidikan IPS
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, Juli 2016



Sekar Ayu Palupi
NPM 1213032072

RIWAYAT HIDUP



Peneliti dilahirkan di Purbolinggo pada tanggal 01 Juli 1994 yang merupakan anak pertama dari empat bersaudara pasangan Bapak Sugianto HS dan Ibu Partini. Pendidikan formal yang pernah ditempuh, TK Aisyiyah Bustanul Athfal di Kecamatan Panjang, Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Tanjung Kesuma Kecamatan Purbolinggo yang diselesaikan pada tahun 2006 berijazah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Muhammadiyah 1 Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur diselesaikan pada tahun 2009 berijazah, Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur diselesaikan pada tahun 2012 berijazah.

Pada tahun 2012, diterima di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung pada jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras untuk (urusan mu yang lain)”.
(Qs. Al - Insyirah: 6-7)

“Membandingkan tak akan ada habisnya, karena diatas langit masih ada langit. Terus memperbaiki diri dan bersyukur saja, itu yang paling penting”.
(Sekar Ayu Palupi)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin...

Segala puji bagi Allah SWT

Atas segala perjuangan dan kerja keras ku kupersembahkan

karya sederhana ini dengan tulus kepada :

Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Sugianto HS. dan Ibu

Partini yang selalu memberikan cinta, kasih sayang,

dukungan dan mendoakanku dalam setiap kerja keras

demi tercapainya keberhasilanku.

Almamaterku Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya dalam penulisan skripsi yang berjudul **“Hubungan Implementasi Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Dengan Peningkatan Tingkat Pendidikan Di Desa Tanjung Kesuma Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur”**.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan yang datang baik dari luar atau dari dalam diri penulis. Penulisan skripsi ini juga tidak lepas dari bimbingan dan bantuan serta petunjuk dari Bapak Drs. Holilulloh, M.Si. selaku pembimbing I dan juga Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd selaku Pembimbing II, sekaligus Ketua Program Studi PPKn yang telah memberikan motivasi dan bimbingannya dalam penyusunan skripsi, terimakasih atas kesediaannya dalam membimbing dan memberikan motivasi dalam bimbingannya. Selain itu penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fuad, M. Hum. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Abdurrahman, M.Si. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Buchori Asyik, M.Si. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
5. Bapak Drs. Zulkarnain, M.Si. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
6. Ibu Dr. Adelina Hasyim, M.Pd. selaku pembahas I, terima kasih atas pengarahan dan bimbingannya kepada penulis.
7. Bapak Edi Siswanto, S.Pd., M.Pd. selaku pembahas II, terima kasih atas kritikan dan saran yang telah diberikan.
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi PPKn Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
9. Bapak dan Ibu staf tata usaha dan karyawan Universitas Lampung.
10. Bapak Kepala Desa Tanjung Kesuma yang telah memberikan izin penelitian dan atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis.
11. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta Bapak Sugianto HS. dan Ibu Partini yang dengan tulus menyayangi dan senantiasa mendoakan

kesuksesanku. Terima kasih atas keikhlasan, kerja keras dan segala perjuangannya dalam mendidik dan membesarkanku hingga saat ini.

12. Adik-adikku tercinta: M. Fikri Izzul Haq, Niken Syafa Kamila, M. Alif Abimanyu. Terima kasih atas keceriaan, kebersamaan serta nasihat-nasihat dan dukungannya untuk ku.
13. Mbah Marsudi dan Mbah Wakem yang senantiasa memberikan nasihat, kasih sayang dan dukungannya untuk ku.
14. Keluarga besar serta saudar-saudara ku yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas doa, dukungan, kasih sayang serta nasihat-nasihatnya.
15. Sahabat-sahabat terbaikku: Lutfiana Cahyani yang telah sabar menjadi teman sekamarku, terima kasih atas persaudarannya hingga saat ini, yang selalu mengingatkan dikala lalai dan selalu memberi semangat. Lima Sekawan (Nur Widiati, Nuke Adisti Rahmadani, Nurul Alliah, Lia Okta Ayu NPB) Terima kasih atas kebersamaan, persahabatan, kebahagiaan dan canda tawa yang telah diberikan, semoga Allah SWT selalu melindungi kita dan memberikan rahmat-Nya.
16. Sahabat-sahabat ku: Mbak Hesti, Maret, Riska, Fenti, Niar, Bulek Kilah, Mbak Rani, Mbak Erni terima kasih atas segala bantuan, dukungan, semangat, dan kebersamaannya hingga saat ini.
17. Teman-teman Program Studi PPKn angkatan 2012 ganjil dan genap yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih untuk kebersamaan dan keceriaan selama menjalankan perkuliahan.

18. Teman-teman UKM Taekwondo Universitas Lampung yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas ilmu, pengalaman, kebersamaan dan canda tawa yang telah diberikan.

19. Teman-teman KKN dan PPL Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkumat Belimbing, terima kasih atas kerja sama, canda tawa dan kebersamaannya selama dua bulan.

20. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Penulis berharap semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Amin.

Bandar Lampung, Juli 2016

Penulis,

Sekar Ayu Palupi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Pembatasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Kegunaan Penelitian	11
a. Kegunaan Secara Teoritis	11
b. Kegunaan Secara Praktis	11
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
1. Ruang Lingkup Ilmu	11
2. Ruang Lingkup Subjek.....	12
3. Ruang Lingkup Objek	12
4. Ruang Lingkup Wilayah	12
5. Ruang Lingkup Waktu	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Deskripsi Teori.....	13
1. Konsep Kebijakan Publik.....	13
a. Kebijakan Publik	13
b. Ciri-ciri Kebijakan Publik	14
c. Teori-teori Pengambilan Keputusan Kebijakan.....	15

d. Kebijakan Sosial dan Kebijakan Publik	17
e. Teori Kesejahteraan Sosial	18
f. Jenis dan Cakupan Pelayanan Sosial.....	21
2. Konsep Implementasi Kebijakan	23
a. Pengertian Implementasi Kebijakan	23
b. Model Implementasi Kebijakan Menurut Edwards.....	25
c. Pendekatan-pendekatan Implementasi.....	32
3. Program Keluarga Harapan	33
a. Orang Yang Berhak Menerima Bantuan PKH	34
b. Syarat Penetapan Penerima Bantuan PKH	34
c. Besaran Bantuan Yang Diterima Peserta PKH.....	35
d. Sanksi Bagi Peserta PKH Yang Tidak Memenuhi Komitmen	36
e. Mekanisme dan Prosedur	36
f. Pendampingan	38
g. Nilai Etik Yang Menjadi Panutan Bagi Pendamping PKH.....	39
4. Pendidikan	45
5. Tingkat Pendidikan	46
a. Pendidikan Dasar	46
b. Pendidikan Menengah	47
c. Pendidikan Tinggi.....	48
6. Teori Belajar Humanisme	50
a. Ciri-ciri Teori Belajar Humanisme	51
b. Tokoh-tokoh Teori Belajar Humanisme.....	51
B. Kajian Penelitian Yang Relevan	54
C. Kerangka Pikir	56
III. METODE PENELITIAN	59
A. Jenis Penelitian	59
B. Populasi dan Sampel	59
1. Populasi	59
2. Sampel.....	60
C. Variabel Penelitian.....	60
D. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional Variabel.....	61
1. Definisi Konseptual.....	61
a. Implementasi Program Keluarga Harapan	61
b. Tingkat Pendidikan	62
2. Definisi Operasional Variabel	63
a. Implementasi Program Keluarga Harapan	63
b. Tingkat Pendidikan.....	64
E. Rencana Pengukuran Variabel	64
1. Variabel Bebas	64
2. Variabel Terikat	65
F. Teknik Pengumpulan Data.....	65
1. Teknik Pokok	65
2. Teknik Penunjang.....	66
G. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	67
1. Uji Validitas	67

2. Uji Reliabilitas	67
H. Teknik Analisis Data.....	69
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73
A. Langkah-langkah Penelitian.....	73
1. Persiapan Pengajuan Judul.....	73
2. Penelitian Pendahuluan.....	74
3. Pengajuan Rencana Penelitian	74
4. Pelaksanaan Penelitian.....	75
a. Persiapan Administrasi.....	75
b. Penyusunan Alat Pengumpulan Data	75
c. Penelitian di Lapangan	76
5. Pelaksanaan Uji Coba Angket	76
a. Analisis Validitas Angket.....	76
b. Analisis Reliabilitas Angket.....	76
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	81
1. Sejarah Berdirinya Desa Tanjung Kesuma	81
2. Profil Desa.....	82
3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tanjung Kesuma	83
4. Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjung Kesuma	84
C. Deskripsi Data	85
1. Pengumpulan Data	85
2. Penyajian Data.....	85
a. Implementasi Program Keluarga Harapan.....	85
b. Peningkatan Tingkat Pendidikan	91
D. Pengujian Hipotesis.....	95
E. Pengujian Tingkat Keeratan Hubungan.....	98
F. Pembahasan	100
G Pembahasan Hubungan Variabel (X) dengan Variabel (Y).....	112
V. KESIMPULAN DAN SARAN	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran	114

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Tingkat Pendidikan di Desa Tanjung Kesuma	2
Tabel 2.1 Skenario Bantuan	35
Tabel 2.2 Sanksi Bagi Peserta PKH	36
Tabel 3.1 Daftar Penerima Bantuan PKH di Desa Tanjung Kesuma	60
Tabel 4.1 Distribusi Hasil Uji Coba Angket di Luar Responden Untuk Item Soal Kelompok Ganjil (X)	77
Tabel 4.2 Distribusi Hasil Uji Coba Angket di Luar Responden Untuk Item Soal Kelompok Genap (Y)	78
Tabel 4.3 Tabel Kerja Item Ganjil (X) dan Item Genap (Y) Dari Uji Coba Angket 10 Orang di Luar Responden	78
Tabel 4.4 Distribusi Skor Angket Implementasi Program Keluarga Harapan (X)	85
Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Tentang Implementasi Program Keluarga Harapan	88
Tabel 4.6 Distribusi Skor Angket Peningkatan Tingkat Pendidikan (Y).....	91
Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Tentang Peningkatan Tingkat Pendidikan	93
Tabel 4.8 Daftar Tingkat Perbandingan Jumlah Responden Mengenai Hubungan Implementasi Program Keluarga Harapan Dengan Peningkatan Tingkat Pendidikan	95
Tabel 4.9 Daftar Kontingensi Perolehan Data Hubungan Implementasi Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Dengan Peningkatan Tingkat Pendidikan	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir.....	58
--------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Dekan FKIP Unila
2. Surat Izin Penelitian Pendahuluan
3. Surat Balasan Penelitian Pendahuluan
4. Surat Keterangan Dekan FKIP Unila
5. Surat Izin Penelitian
6. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
7. Kisi-kisi Angket
8. Angket Penelitian

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu bentuk usaha menuju pendewasaan dalam kehidupan. Melalui pendidikan maka dapat tercipta kehidupan yang lebih baik. Bagi setiap Negara, pendidikan merupakan aspek penting yang mempunyai pengaruh bagi kemajuan Negara di dunia. Tanpa pendidikan, maka suatu Negara akan mengalami perkembangan yang sangat lambat.

Hal ini sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-empat yang berbunyi “Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa , dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 dan 2 tentang pendidikan dan kebudayaan yang berbunyi : (1) “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan” dan pada ayat (2) “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.” Hal ini juga selaras dengan tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu “*Smart and Good Citizenship*” yang ingin membentuk warga negara yang baik dan cerdas melalui pendidikan.

Namun pada kenyataannya masih banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi. Berikut adalah data mengenai tingkat pendidikan masyarakat yang ada di Desa Tanjung Kesuma Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 1.1 : Tingkat Pendidikan di Desa Tanjung Kesuma Tahun 2007 – 2015

No	Tingkat Pendidikan	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1.	Buta Huruf	185 orang	184 orang	149 orang	154 orang	58 orang	40 orang	39 orang	39 orang	39 orang
2.	Tidak Tamat Sekolah Dasar	73 orang	74 orang	74 orang	57 orang	58 orang	59 orang	60 orang	58 orang	59 orang
3.	Tamat SD/ sederajat	742 orang	744 orang	786 orang	835 orang	872 orang	883 orang	804 orang	867 orang	919 orang
2.	Tamat SLTP/ sederajat	556 orang	558 orang	636 orang	699 orang	711 orang	755 orang	800 orang	828 orang	878 orang
3.	Tamat SLTA/ sederajat	483 orang	484 orang	524 orang	522 orang	550 orang	599 orang	642 orang	674 orang	790 orang
4.	Tamat Akademi/ sederajat	74 orang	73 orang	39 orang	57 orang	58 orang	39 orang	39 orang	78 orang	40 orang
5.	Tamat Perguruan tinggi/ sederajat	112 orang	111 orang	77 orang	79 orang	117 orang	79 orang	79 orang	117 orang	118 orang

Sumber : Data Kependudukan Kecamatan Purbolinggo

Berdasarkan data tingkat pendidikan di Desa Tanjung Kesuma pada tahun 2007 sampai 2015, penduduk Desa Tanjung Kesuma yang buta huruf mengalami penurunan, dari 185 orang menjadi 39 orang. Penduduk yang tidak tamat Sekolah Dasar mengalami penurunan juga dari 73 orang menjadi 59 orang. Penduduk yang tamat SD/ sederajat, mengalami kenaikan jumlah yaitu dari 742 orang menjadi 919 orang, yang tamat SMP dan SMA sederajat mengalami kenaikan, yaitu masing-masing tingkat pendidikan dari 556 orang menjadi 878 orang serta

untuk tamat SMA dari 483 orang menjadi 790 orang. Untuk tingkat pendidikan Tinggi seperti akademi dan perguruan tinggi, jumlahnya fluktuatif, penduduk yang tamat pendidikan tinggi tidak menentu setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena sebagian orang tua masih menganggap bahwa biaya pendidikan untuk perguruan tinggi itu mahal dan masih adanya rasa khawatir jika nantinya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan anaknya di perguruan tinggi.

Data di atas menunjukkan bahwa masih ada masyarakat di Desa Tanjung Kesuma yang buta huruf dan tidak tamat SD/ sederajat. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya kemiskinan, sehingga menyebabkan masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan sekolah anaknya, mengingat biaya pendidikan tidaklah murah. Kemiskinan merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Pada tahun 2006 penduduk miskin berjumlah 39,05 juta jiwa (17,75%) dari total penduduk Indonesia, dari jumlah tersebut terdapat 19,2 juta rumah tangga dan 14,8 juta jiwa penduduk yang termasuk fakir miskin, dan hingga saat ini kemiskinan masih menjadi masalah yang dominan pada tahun 2013 terdapat 13,7 juta fakir miskin dari 30 juta lebih warga miskin (data Pusdatin Kementerian Sosial Republik Indonesia).

Dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 1 disebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara” serta dalam pasal 34 ayat 2 UUD 1945 juga dijelaskan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia”. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia selalu berusaha untuk mengejar ketertinggalannya, yaitu dengan

melakukan pembangunan di segala bidang kehidupan khususnya pada bidang pendidikan. Melihat pentingnya pendidikan yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna menunjang tercapainya pembangunan nasional, maka perlu adanya peningkatan taraf pendidikan bagi warga negara Indonesia yang hingga saat ini masih menjadi masalah nasional dan perlu mendapat perhatian yang serius. Dalam menanggulangi masalah kemiskinan perlu terintegrasi dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Penanganan masalah kemiskinan merupakan salah satu fokus pembangunan nasional yang harus ditangani secara terpadu dan melibatkan berbagai sektor. Banyak kebijakan dan program yang ditujukan guna percepatan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan baik secara sektoral, multisektor maupun lintas stakeholder, salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH).

Program Keluarga Harapan merupakan program penanggulangan kemiskinan dan pengembangan sistem perlindungan sosial bersyarat bagi masyarakat miskin, ditujukan untuk mempercepat pencapaian tujuan *Millenium Development Goals* (MDG) yang banyak didengungkan di seluruh dunia pada awal tahun 2007. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global tentu saja harus mampu mewujudkan pembangunan tersebut, yaitu :

1. Pengurangan penduduk miskin dan kelaparan,
2. Meningkatkan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun,
3. Kesetaraan gender,
4. Penanggulangan angka kematian bayi dan balita,
5. Penurunan angka kematian ibu melahirkan.

Menurut bagian Direktorat Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia yang disampaikan dalam Rakornas mengenai Kebijakan Kementerian Sosial Republik Indonesia pada Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2012 dan Prospek Tahun 2012, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai bersyarat (*conditional cash trans*) kepada rumah tangga sangat miskin berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Program ini merupakan program perlindungan sosial melalui pemberian uang tunai kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) dimana Keluarga Sangat Miskin tersebut diwajibkan untuk memeriksakan anggota keluarganya ke Puskesmas dan menyekolahkan anaknya yang masih menempuh pendidikan wajib belajar 9 tahun.

Dengan Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan Rumah Tangga Sangat Miskin/Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM) penerima bantuan memiliki akses yang lebih baik untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan, dan gizi termasuk menghilangkan kesenjangan sosial, ketidakberdayaan dan keterasingan sosial yang selama ini melekat pada diri warga miskin sehingga mereka dapat berfungsi sosial dan akhirnya rantai kemiskinan dapat diputus.

Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah RTSM yang memenuhi satu atau beberapa kriteria yaitu memiliki ibu hamil/nifas, anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, anak usia SD dan SLTP, dan anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Sebagai penerima bantuan, keluarga sangat miskin diwajibkan memenuhi

persyaratan dalam hal pendidikan dan kesehatan. Namun dalam hal ini pembahasan akan difokuskan pada bidang pendidikan.

Kewajiban peserta PKH dalam bidang pendidikan yaitu peserta yang memiliki anak usia 7-15 tahun harus didaftarkan atau terdaftar pada satuan pendidikan (SD, MI, Paket A atau SMP, MTs, SMP atau MTs Terbuka dan Paket B) dan mengikuti kehadiran di kelas minimal 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama Tahun ajaran berlangsung. Apabila ada anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk SD, maka yang bersangkutan dikenakan prasyarat pendidikan. Jika peserta Program Keluarga Harapan memiliki anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, maka peserta diwajibkan mendaftarkan anak tersebut ke satuan pendidikan yang menyelenggarakan program Wajib Belajar 9 tahun atau pendidikan kesetaraan. Apabila peserta PKH tidak memenuhi kewajibannya atau komitmennya, maka sanksi yang berlaku adalah sebagai berikut :

1. Pengurangan bantuan adalah 10% setiap bulannya sebelum pembayaran periode berikutnya
2. Peserta tidak akan menerima bantuan jika seluruh anggota tidak memenuhi kewajiban selama tiga bulan berturut-turut.

Program Keluarga Harapan ini berada di bawah kendali Direktorat Jendral Bantuan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial. Selanjutnya untuk di setiap provinsi terdapat Tim Koordinasi PKH Provinsi yang melakukan koordinasi persiapan provinsi untuk mendukung pelaksanaan PKH, serta melaksanakan koordinasi rutin terhadap partisipasi provinsi dan kabupaten/kota terkait dalam

pelaksanaan PKH. Untuk memudahkan pelaksanaan Program Keluarga Harapan di tingkat kecamatan, maka dibentuklah Unit Pelaksana PKH Kecamatan yang terdapat peserta PKH. UPPKH Kecamatan merupakan ujung tombak PKH karena unit ini berhubungan langsung dengan peserta PKH. Personel UPPKH Kecamatan terdiri dari pendamping PKH. Secara kelembagaan, pendamping harus melaporkan seluruh kegiatan dan permasalahannya ke Sekretariat UPPKH Kabupaten/Kota (Dinas Sosial) dan Koordinator wilayah. Dalam pelaksanaan tugas sehari – hari, UPPKH kecamatan bertanggung jawab kepada UPPKH Kota dan berkoordinasi dengan Camat. Namun dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan masih terdapat hambatan, diantaranya masih adanya kecemburuan sosial dari masyarakat yang tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan, sehingga secara tidak langsung dapat berpotensi timbulnya konflik secara vertikal dan horizontal.

Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH) bersifat multisektor baik di pusat maupun di daerah melibatkan instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan hingga Desa, serta masyarakat. Bantuan yang disalurkan bersumber dari APBN, untuk kelancaran pelaksanaan di Kabupaten/Kota terdapat keterlibatan APBD untuk kegiatan pendukung Program Keluarga Harapan di tingkat Kabupaten/Kota.

Di Indonesia kebijakan sosial yang berkaitan dengan program jaminan sosial dirumuskan dengan merujuk pada UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar

hidupnya yang layak. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial. Berdasarkan asas, tujuan, dan prinsip penyelenggaraan yang terdapat dalam Bab III Pasal 2 dan 3, bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

Dari sisi kebijakan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan cikal bakal pengembangan sistem perlindungan sosial bersyarat, khususnya bagi RTSM. Program Keluarga Harapan (PKH) yang mewajibkan RTSM memeriksakan kesehatan ibu hamil dan memberikan imunisasi dan pemantauan tumbuh kembang anak, termasuk menyekolahkan anak-anak, akan membawa perubahan perilaku RTSM terhadap pentingnya kesehatan dan pendidikan. Perubahan perilaku tersebut diharapkan juga akan berdampak pada berkurangnya anak usia sekolah RTSM yang bekerja ataupun tidak melanjutkan pendidikan. Sebaliknya hal ini menjadi tantangan utama pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin dimanapun mereka berada.

Berdasarkan dasar hukum yang telah disebutkan di atas, maka Program Keluarga Harapan ini penting sebagai solusi dalam menanggulangi masalah pendidikan, khususnya masalah tingkat pendidikan yang masih rendah. Salah satu fokus penyelenggaraan Program Keluarga Harapan ini adalah ingin meningkatkan

kebutuhan akan Pendidikan Dasar 9 tahun, sehingga diharapkan dengan adanya Program Keluarga Harapan ini pendidikan dasar 9 tahun dapat terpenuhi dengan baik. Program Keluarga Harapan di Kecamatan Purbolinggo sendiri baru terlaksana pada tahun 2014. Di Desa Tanjung Kesuma terdapat 33 orang yang menerima bantuan ini yang tersebar dalam enam dusun. Berdasarkan data bahwa dengan adanya Program Keluarga Harapan, tingkat pendidikan di Desa Tanjung Kesuma Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur mengalami peningkatan, terutama untuk program pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun. Yang menjadi fokus dari Program Keluarga Harapan itu sendiri.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka masalah ini penting untuk diteliti. Dalam proposal penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana hubungan implementasi program keluarga harapan dinas sosial dengan tingkat pendidikan di Desa Tanjung Kesuma Kecamatan Purbolinggo.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas dan hasil observasi awal yang telah dilakukan, terdapat beberapa faktor yang dapat diidentifikasi, faktor tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Kemiskinan menjadi salah satu faktor penyebab masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia
2. Implementasi Program Keluarga Harapan memiliki hubungan dengan tingkat pendidikan

3. Persepsi orang tua tentang biaya pendidikan di perguruan tinggi yang mahal
4. Rasa khawatir orang tua tentang kebutuhan pendidikan anaknya di perguruan tinggi

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan diatas, maka masalah-masalah yang akan dikaji pada penelitian ini dibatasi pada :

1. Hubungan implementasi Program Keluarga Harapan Dinas Sosial dengan peningkatan tingkat pendidikan di Desa Tanjung Kesuma Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimanakah hubungan implementasi Program Keluarga Harapan Dinas Sosial dengan peningkatan tingkat pendidikan di Desa Tanjung Kesuma Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur”.

3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan bagaimanakah hubungan implementasi Program Keluarga Harapan Dinas Sosial dengan peningkatan tingkat pendidikan di Desa Tanjung Kesuma Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur.

2. Kegunaan Penelitian

a). Kegunaan Teoritis

Penelitian hubungan implementasi Program Keluarga Harapan Dinas Sosial dengan peningkatan tingkat pendidikan di Desa Tanjung Kesuma Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur. Secara teoritis untuk mengembangkan konsep, teori, prinsip dan prosedur ilmu pendidikan khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan khususnya wilayah kajian Pendidikan Kewarganegaraan, karena berhubungan dengan hak dan kewajiban warga negara untuk mendapatkan perlindungan bagi fakir miskin.

b). Kegunaan Praktis

Penelitian ini berguna untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Desa Tanjung Kesuma. Penelitian ini juga berguna untuk masyarakat agar lebih meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya meningkatkan taraf pendidikan untuk menunjang sumber daya manusia yang unggul.

F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk ruang lingkup ilmu pendidikan, khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang membahas tentang hubungan implementasi Program Keluarga Harapan Dinas Sosial dengan peningkatan tingkat pendidikan di Desa Tanjung Kesuma Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah hubungan implementasi Program Keluarga Harapan Dinas Sosial dengan tingkat pendidikan di Desa Tanjung Kesuma Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur .

3. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Tanjung Kesuma Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan.

4. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tanjung Kesuma Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur.

5. Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini adalah sejak dikeluarkan surat izin penelitian pendahuluan Nomor 7720/UN26/3/PL/2015 tanggal 18 November 2015 oleh Dekan FKIP Universitas Lampung sampai dengan tanggal 08 April 2016 pada surat keterangan telah melaksanakan penelitian Nomor 140/02.3/08.2012/2016 oleh Kepala Desa Tanjung Kesuma Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Konsep Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

“Kebijakan ialah suatu pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam makna seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana” (United Nation, 1975 dalam Wahab, 2012:9).

Menurut W.I Jenkins (1978:15) sebagaimana dikutip oleh Wahab (2012:15), merumuskan kebijakan publik sebagai “Serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi, keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut”.

Chief J. O. Udoji (1981) dalam Wahab (2012:15) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “Suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat”.

b. Ciri-ciri Kebijakan Publik

Kebijakan publik itu pada hakikatnya merupakan sebuah aktivitas yang khas (*a unique activity*), dalam artian ia mempunyai ciri-ciri khusus yang tidak dimiliki oleh kebijakan jenis lain. Sebagaimana tercantum dalam Wahab (2012:20), ciri-ciri kebijakan publik adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang sengaja dillakukan dan mengarah pada tujuan tertentu,
2. Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, dan bukan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri,
3. Kebijakan itu ialah apa yang nyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu,
4. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Dalam bentuk positif, kebijakan publik akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi penyelesaian atas masalah tertentu, sedangkan dalam bentuk negatif, meliputi keputusan-keputusan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah sebenarnya justru diperlukan.

c. Teori-teori Pengambilan Keputusan Kebijakan

Secara tipikal, pembuatan kebijakan merupakan tindakan yang berpola, yang dilakukan sepanjang waktu dan melibatkan banyak keputusan diantaranya ada yang merupakan keputusan rutin, dan ada pula yang tidak rutin. Dalam praktik pembuatan kebijakan, terdapat beberapa teori yakni, teori rasional komprehensif, teori inkremental dan teori pengamatan terpadu (Wahab, 2012:75).

1. Teori Rasional Komprehensif

Teori rasional komprehensif barangkali merupakan teori yang paling dikenal dan mungkin yang mungkin banyak diterima oleh kalangan luas. Unsur-unsur utama dari teori ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Pembuat keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu, yang dapat dibedakan dari masalah-masalah lain
- b. Tujuan-tujuan, nilai-nilai, atau sasaran yang memberikan pedoman pembuat keputusan amat jelas dan dapat ditetapkan rankingnya sesuai dengan urutan kepentingannya
- c. Berbagai alternatif untuk memecahkan masalah tersebut diteliti secara seksama
- d. Akibat-akibat (biaya dan manfaat) yang ditimbulkan oleh setiap alternatif yang dipilih diteliti
- e. Setiap alternatif dan masing-masing akibat yang menyertainya, dapat dibandingkan dengan alternatif-alternatif lainnya
- f. Pembuat keputusan akan memilih alternatif dan akibatnya, yang dapat memaksimalkan tercapainya tujuan, nilai, atau sasaran yang telah digariskan.

2. Teori Inkremental

Teori inkremental dalam pengambilan keputusan mencerminkan teori pengambilan keputusan yang menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan (seperti dalam teori rasional komprehensif), dan pada saat yang sama, merupakan teori yang lebih banyak menggambarkan cara yang ditempuh oleh pejabat-pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan sehari-hari. Pokok-pokok teori inkremental adalah sebagai berikut :

- a. Pemilihan tujuan atau sasaran dan analisis tindakan empiris yang diperlukan untuk tercapainya dipandang sebagai sesuatu hal yang saling terkait
- b. Pembuat keputusan dianggap hanya mempertimbangkan beberapa alternatif yang langsung berhubungan dengan pokok masalah
- c. Bagi tiap alternatif, hanya sejumlah kecil akibat-akibat yang mendasar saja yang perlu dievaluasi
- d. Masalah yang dihadapi oleh pembuat keputusan akan didefinisikan secara teratur
- e. Tidak ada keputusan atau cara pemecahan yang tepat bagi tiap masalah
- f. Pembuatan keputusan yang inkremental pada hakikatnya bersifat perbaikan-perbaikan kecil.

3. Teori Pengamatan Terpadu (*Mixed Scanning Theory*)

Penganjur teori ini adalah ahli sosiologi organisasi, Amitai Etzioni. Etzioni dalam Wahab (2012:83) menyodorkan konsep *mixed scanning* (pengamatan terpadu) sebagai suatu pendekatan untuk pengambilan keputusan yang memperhitungkan, baik keputusan-keputusan yang bersifat fundamental

maupun keputusan-keputusan yang bersifat inkremental, dan memberikan urutan teratas bagi proses pembuatan kebijakan yang berfungsi memberikan arahan dasar dan proses-proses pembuatan kebijakan inkremental yang melapangkan jalan bagi keputusan-keputusan fundamental sesudah keputusan-keputusan ini tercapai. Model pengamatan terpadu, menurut Etzioni akan memungkinkan para pembuat keputusan untuk memanfaatkan teori rasional komprehensif maupun teori inkremental pada situasi yang berbeda-beda. Dengan demikian, model pengamatan terpadu ini pada hakikatnya merupakan pendekatan kompromistis dalam proses pengambilan keputusan yang mencoba menggabungkan secara arif pemanfaatan model komprehensif dan model inkremental.

d. Kebijakan Sosial dan Kebijakan Publik

Kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik. Kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Watts, Dalton dan Smith (2006:4) dalam Suharto (2013:11) mengatakan bahwa kebijakan sosial menunjuk pada apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan pendapat, pelayanan kemasyarakatan, dan program-program tunjangan sosial lainnya.

Sebagai sebuah kebijakan publik, kebijakan sosial memiliki fungsi preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan), dan pengembangan (*developmental*). Kebijakan sosial adalah ketetapan yang didesain secara kolektif untuk mencegah

terjadinya masalah sosial (fungsi preventif), mengatasi masalah sosial (fungsi kuratif) dan mempromosikan kesejahteraan (fungsi pengembangan) sebagai wujud kewajiban negara (*state obligate*) dalam memenuhi hak-hak sosial warganya (Suharto, 2013:11). Di Indonesia, sebagai ilustrasi, kebijakan sosial yang berkaitan dengan program jaminan sosial dirumuskan dengan merujuk pada UUD 1945 Pasal 34 dan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Salah satu bentuk kebijakan sosial adalah program pelayanan sosial. Pelayanan sosial adalah aksi atau tindakan untuk mengatasi masalah sosial. Pelayanan sosial dapat diartikan sebagai seperangkat program yang ditujukan untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pelayanan sosial tidak dapat dipisahkan dengan pekerjaan sosial sebagai profesi kemanusiaan yang memiliki tugas utama memberikan atau mendistribusikan pelayanan sosial.

e. Teori Kesejahteraan Sosial

Kondisi sejahtera (*well-being*) biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non material. Menurut Midgley (2000:11) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai “*a condition or state of human well-being*”. Kondisi sejahtera terjadi jika kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi,

Menurut definisinya kesejahteraan sosial dibagi menjadi tiga kelompok yaitu kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan, kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan atau pelayanan dan kesejahteraan sosial sebagai ilmu (Suud, 2006). Menurut Suharto (2006:3) kesejahteraan sosial juga termasuk sebagai suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Terdapat beberapa definisi mengenai kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan, diantaranya sebagai berikut :

Kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan Menurut Suparlan dalam Suud (2006:5), kesejahteraan sosial menandakan keadaan keadaan sejahtera pada umumnya, yang meliputi keadaan jasmaniah, rohaniyah, dan sosial dan bukan hanya perbaikan dan pemberantasan keburukan sosial tertentu saja, jadi merupakan suatu keadaan dan kegiatan. Selain itu, menurut Friedlander dalam Suud (2006:8)

kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dimaksudkan untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan, dan hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk memperkembangkan seluruh kemampuannya untuk meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

Kesejahteraan sosial menurut Segal dan Bruzzy yang dikutip dalam Suud (2006:5), kesejahteraan sosial adalah kondisi sejahtera dari suatu masyarakat.

Kesejahteraan sosial meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat. Kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan menurut beberapa ahli diantaranya sebagai berikut :

Menurut Wilensky dan Lebeaux dalam Suud (2006:7) merumuskan kesejahteraan sosial sebagai :

Sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan. Maksudnya agar tercipta hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada individu-individu untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka seluas-luasnya dan meningkatkan kesejahteraan mereka sesuai kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Menurut Wickedan dalam Suud (2006:8), kesejahteraan sosial adalah suatu sistem peraturan, program-program, kebaikan-kebaikan, pelayanan-pelayanan yang memperkuat atau menjamin penyediaan pertolongan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial yang diakui sebagai dasar bagi penduduk dan keteraturan sosial.

Kesejahteraan sosial sebagai suatu ilmu , menurut Segal dan Bruzuzy dalam Suud (2006:90) , kebijakan sosial juga merupakan bagian dari sistem kesejahteraan sosial. Sistem kesejahteraan sosial terdiri dari usaha-usaha dan struktur-struktur yang terorganisasi untuk menyediakan kesejahteraan masyarakat. Dalam bentuk sederhana, sistem kesejahteraan sosial dapat dikonseptualisasikan sebagai empat bagian yang saling berhubungan sebagai berikut: 1) isu-isu sosial; 2) tujuan-tujuan kebijakan; 3) perundangan/peraturan; 4) program-program kesejahteraan sosial. Sistem kesejahteraan sosial dimulai dengan mengenali isu sosial. Sekali isu tersebut diakui sebagai perhatian sosial, langkah selanjutnya adalah mengartikulasikan tujuan-tujuan kebijakan. Tujuan-tujuan ini dapat menghasilkan suatu posisi publik yang diciptakan melalui perundangan atau peraturan. Akhirnya, perundangan diterjemahkan ke dalam tindakan melalui penerapan suatu program kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan sosial dapat diukur melalui tingkat kehidupan, (*level of living*), pemenuhan kebutuhan pokok (*basic needs fulfillment*), kualitas hidup (*quality of life*) dan pembangunan manusia (*human development*) (Sen,2008:8). Ketika semua karakteristik atau tuntutan dasar dalam kehidupan bermasyarakat sudah terpenuhi, secara otomatis kesejahteraan sosial juga sudah di dapat.

f. Jenis dan Cakupan Pelayanan Sosial

Dalam konteks kebijakan publik, jenis-jenis pelayanan sosial yang diselenggarakan negara lebih banyak difokuskan untuk kelompok-kelompok lemah. Negara-negara industri maju, seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Selandia Baru, kebijakan sosial mencakup ketentuan atau regulasi pemerintah mengenai lima bidang pelayanan sosial yaitu jaminan sosial, pelayanan perumahan, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan atau perawatan sosial personal (Suharto, 2007a:160-167) dalam Suharto (2013:14-15).

1. Jaminan Sosial

Jaminan sosial (*social security*) adalah sistem atau skema pemberian tunjangan yang menyangkut pemeliharaan penghasilan (*income maintenance*). Sebagai pelayanan sosial publik, jaminan sosial merupakan perangkat negara yang di desain untuk menjamin bahwa setiap orang sekurang-kurangnya memiliki pendapatan minimum yang cukup untuk memnuhi kebutuhan dasarnya. Jaminan sosial merupakan sektor kunci dari sistem negara kesejahteraan berdasarkan prinsip bahwa negara harus berusaha dan mampu menjamin adanya jaring pengaman pendapatan (*financial safety net*) atau pemeliharaan pendapatan

(*income maintenance*) bagi mereka yang tidak memiliki sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Suharto, 2013:16).

2. Perumahan

Rumah atau tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar manusia. Negara memiliki kewajiban azazi untuk menyediakan perumahan bagi warganya, khususnya mereka yang tergolong keluarga kurang mampu. Pelayanan perumahan yang disediakan pemerintah adalah perumahan publik atau perumahan sosial, seperti menyediakan Rusunawa.

3. Kesehatan

Pelayanan kesehatan dapat dipandang sebagai aspek penting dalam kebijakan sosial. Kesehatan merupakan faktor penentu bagi kesejahteraan sosial. Peran pemerintah dalam pelayanan kesehatan publik ini juga mencakup kepemilikan rumah sakit dan pusat-pusat kesehatan, termasuk penetapan kebijakan terhadap penyelenggara dan penyedia perawatan kesehatan yang di sediakan oleh pihak swasta.

4. Pendidikan

Negara memiliki tiga kewajiban penting dalam bidang pendidikan. Pertama sebagai penyedia utama lembaga-lembaga pendidikan, seperti sekolah, akademi, universitas. Kedua, sebagai regulator atau pengatur penyelenggara pendidikan, baik pendidikan negeri, swasta, maupun lembaga-lembaga non formal. Ketiga, fasilitator dalam penyediaan infrastruktur pendidikan, termasuk di dalamnya penyedia skema-skema beasiswa dan tunjangan-tunjangan pendidikan bagi siswa-siswa berprestasi da atau tidak mampu. Pendidikan merupakan perangkat

penting dalam meningkatkan kesejahteraan warga melalui penguasaan pengetahuan, informasi dan teknologi sebagai prasyarat masyarakat modern. Pelayanan pendidikan dalam konteks kebijakan sosial bukan saja ditujukan untuk menyiapkan dan menyediakan angkatan kerja, melainkan pula untuk mencapai tujuan sosial dalam arti luas, yakni membebaskan masyarakat dari kebodohan dan keterbelakangan.

5. Pelayanan Sosial Personal (*personal social service*)

Pelayanan sosial personal merupakan salah satu bidang kebijakan sosial yang populer sejak tahun 1960an. Pelayanan ini menunjuk pada berbagai perawatan sosial (*social care*) diluar pelayanan kesehatan, pendidikan dan jamninan sosial. Dalam garis besarnya, pelayanan ini mencakup tiga jenis yaitu, perawatan anak (*child care*), perawatan masyarakat (*community care*), dan peradilan kriminal (*criminal justice*).

2. Konsep Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan suatu aktivitas yang paling penting. Tetapi tidak seperti anggapan sebagian orang bahwa setiap kebijakan itu akan terimplementasikan dengan sendirinya. Realita menunjukkan, implementasi kebijakan itu sejak awal melibatkan sebuah proses rasional dan emosional yang teramat kompleks. Studi implementasi mau tak mau akan memasuki ranah permasalahan konflik, keputusan–keputusan yang pelik, dan isu mengenai siapa yang memperoleh apa, berapa banyak dari suatu kebijakan.

Ripley dan Franklin dalam Budi Winarno (2014:148), berpendapat bahwa “Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan orientasi program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*)”. Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Sementara itu, Grindle dalam Budi Winarno (2014:149), juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, “Tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah”. Oleh karena itu tugas implementasi mencakup terbentuknya “*a policy delivery system*,” dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.

Selanjutnya, Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2014:149), membatasi “Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya”. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan

usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditekankan disini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

b. Model Implementasi Kebijakan Menurut Edwars

Menurut George C. Edwards dalam Budi Winarno (2014), studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administration dan public policy*. Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Dalam mengkaji implementasi kebijakan, Edwars mulai dengan mengajukan buah pertanyaan, yakni : Prakondisi-prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu impementasi kebijakan berhasil? Dan hambatan-hambatan utama apa yang mengakibatkan suatu implementasi gagal? Edwars berusaha menjawab dua pertanyaan penting ini dengan membicarakan empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor atau variabel tersebut adalah komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan, atau tingkah laku-tingkah laku dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Secara umum Edwars membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan (*clarity*). Menurut

Edwards, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Tentu saja, komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Berikut penjelasan mengenai tiga hal penting yang ada dalam komunikasi.

a. Transmisi

Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.

b. Kejelasan

Faktor kedua yang dikemukakan Edwards adalah kejelasan. Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-instruksi yang diteruskan kepada pelaksana-pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan.

c. Konsistensi

Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah konsistensi. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka

perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

Menurut Edwards, dengan menyelidiki hubungan antara komunikasi dan implementasi, maka kita dapat mengambil generalisasi, yakni bahwa semakin cermat keputusan-keputusan dan perintah-perintah pelaksanaan diteruskan kepada mereka yang harus melaksanakannya, maka semakin tinggi probabilitas keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah pelaksanaan tersebut dilaksanakan. Dalam situasi seperti ini, penyimpangan-penyimpangan transmisi merupakan sebab utama bagi kegagalan implementasi.

2. Sumber-sumber

Sumber-sumber dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumber-sumber yang penting meliputi : staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul diatas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

a. Staf

Barangkali sumber yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan adalah staf. Ada satu hal yang harus diingat bahwa jumlah tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan. Hal ini bahwa jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong implementasi yang

berhasil. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kecakapan yang dimiliki oleh para pegawai pemerintah ataupun staf, namun di sisi yang lain kekurangan staf juga akan menimbulkan persoalan yang pelik menyangkut implementasi kebijakan yang efektif.

b. Informasi

Informasi merupakan sumber penting yang kedua dalam implementasi kebijakan. Informasi mempunyai dua bentuk. *Pertama*, informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Dengan demikian, para pelaksana kebijakan harus diberi petunjuk untuk melaksanakan kebijakan. *Kedua*, data tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah. Pelaksana-pelaksana harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan mentaati undang-undang atau tidak. Informasi mengenai program-program adalah penting terutama bagi kebijakan-kebijakan baru atau kebijakan-kebijakan yang melibatkan persoalan-persoalan teknis seperti misalnya, kebijakan mengenai otonomi daerah dan rumah sakit swadana.

c. Wewenang

Sumber lain yang penting dalam pelaksanaan adalah wewenang. Wewenang ini akan berbeda dari satu program ke program yang lain serta mempunyai banyak bentuk yang berbeda, seperti misalnya : hak untuk mengeluarkan surat panggilan untuk datang ke pengadilan, mengajukan masalah –masalah ke pengadilan, mengeluarkan perintah kepada para pejabat lain, menarik dana

dari suatu program, menyediakan dana, staf dan bantuan teknis kepada pemerintah daerah, membeli barang-barang dan jasa, atau memungut pajak.

d. Fasilitas

Fasilitas fisik bisa pula merupakan sumber-sumber penting dalam implementasi. Tanpa bangunan sebagai kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, tanpa perbekalan, maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil.

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan sumber-sumber implementasi kebijakan adalah bahwa sumber-sumber kebijakan sangat penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Tanpa sumber-sumber, kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan diatas kertas mungkin hanya akan menjadi rencana saja dan tidak pernah ada realisasinya. Sumber-sumber yang akan mendukung kebijakan yang efektif terdiri dari jumlah staf yang mempunyai keterampilan yang memadai serta dengan jumlah yang cukup, kewenangan, informasi, dan fasilitas.

3. Kecenderungan-kecenderungan

Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap sesuatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Beberapa kebijakan dapat digolongkan ke dalam “zona ketidakacuhan” para administrator. Kebijakan-kebijakan yang masuk dalam “zona ketidakacuhan” ini mungkin bertentangan dengan pandangan-pandangan

kebijakan substantif para pelaksana atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi mereka. Disinilah kecenderungan-kecenderungan menimbulkan hambatan-hambatan terhadap implementasi.

4. Struktur birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Dengan merujuk pada peran yang dijalankan birokrasi dalam proses implementasi, maka mengetahui struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan. Menurut Edwards, ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut sebagai *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi.

a. Pengaruh Struktur Organisasi Bagi Implementasi (SOP)

Struktur organisasi-organisasi yang melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh penting pada implementasi. Salah satu dari aspek-aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya (*Standar Operating Procedures, SOP*). Prosedur-prosedur ini dalam menanggulangi keadaan-keadaan umum digunakan dalam organisasi-organisasi publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu, SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi –

organisasi yang kompleks dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar (orang dapat berpindah dengan mudah dari suatu tempat ke tempat lain) dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan-peraturan.

b. Fragmentasi

Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi organisasi. Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan dua konsekuensi pokok yang merugikan bagi implementasi yang berhasil. *Pertama*, tidak ada orang yang akan mengakhiri implementasi kebijakan dengan melaksanakan fungsi-fungsi tertentu karena tanggung jawab bagi suatu bidang terpecah-pecah. *Kedua*, pandangan-pandangan yang sempit dari badan-badan mungkin juga akan menghambat perubahan.

Berdasarkan uraian mengenai implementasi kebijakan yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang rumit dan kompleks. Namun, dibalik kerumitan dan kompleksitasnya tersebut, implementasi kebijakan memiliki peran yang penting dalam proses kebijakan. Tanpa adanya tahap implementasi kebijakan, program-program kebijakan yang telah disusun hanya akan menjadi catatan-catatan resmi di meja para pembuat kebijakan. Dengan adanya beberapa faktor yang di kemukakan oleh Edwards, dapat memudahkan kita untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

c. Pendekatan-pendekatan Implementasi

1. Pendekatan-pendekatan Struktural

Dalam hubungan ini implementasi akan membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif, proses pembuatan kebijakan secara keseluruhan menjadi lebih bersifat linier, dan hubungan antara kebijakan dan implementasi akan mendekati apa yang oleh Barret dan Fudge disebut sebagai *policy action policy continuum*. Dapat dikatakan bahwa struktur yang bersifat organis tampaknya amat cocok untuk situasi-situasi implementasi, dimana kita perlu merancang bangun struktur yang mampu melaksanakan suatu kebijakan yang senantiasa berubah, bila dibandingkan dengan merancang bangun struktur khusus untuk program yang sekali selesai.

2. Pendekatan-pendekatan Prosedural dan Manajerial

Implementasi dipandang sebagai semata-mata masalah teknis atau masalah manajerial. Di sini, prosedur-prosedur yang dimaksud termasuk diantaranya yang menyangkut penjadwalan (*scheduling*), perencanaan (*panning*), dan pengawasan (*control*).

3. Pendekatan-pendekatan Keprilakuan

Pendekatan keprilakuan diawali dengan suatu kesadaran bahwa seringkali terdapat penolakan terhadap perubahan (*resistance to change*). Menurut pendekatan ini, tujuannya untuk menciptakan suasana saling percaya, terutama dengan cara pihak pimpinan menunjukkan perhatian yang besar terhadap kepentingan orang-orang dan terhadap perasaan mereka yang kurang jelas,

seperti tentang kemungkinan kehilangan rekan kerja, ketidakamanan pribadi, dan sebagainya.

4. Pendekatan-pendekatan Politik

Pendekatan politik ini secara fundamental menentang asumsi yang diketengahkan oleh ketiga pendekatan terdahulu, khususnya pendekatan keprilakuan. Pada umumnya, para ilmuwan sosial menentang asumsinya bahwa konflik itu adalah suatu bentuk penyimpangan yang dapat disembuhkan dengan cara menyempurnakan kemampuan komunikasi antar pribadi. Dengan demikian, keberhasilan suatu kebijakan pada akhirnya akan tergantung pada kesediaan dan kemampuan kelompok-kelompok yang dominan untuk memaksakan kehendaknya.

3. Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin/Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM). Tujuan umum PKH adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mengubah pandangan, sikap, serta perilaku RTSM/KSM untuk lebih dapat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target *Millenium Development Goals* (MDG's). Secara khusus tujuan PKH adalah :

1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas, anak balita dan anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar (anak pra sekolah atau disingkat apras) dari RTSM

2. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak RTSM
3. Meningkatnya taraf pendidikan anak-anak RTSM

Program Keluarga Harapan memiliki dua komponen utama yaitu pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan.

a. Orang Yang Berhak Menerima Bantuan PKH

Penerima bantuan PKH yang selanjutnya disebut peserta PKH adalah RTSM/KSM yang berdomisili di lokasi terpilih yang memiliki satu atau beberapa kriteria :

1. Memiliki anak SD/Madrasah Ibtidaiyah/sederajat
2. Memiliki anak SMP/Madrasah Tsanawiyah/sedrajat
3. Memiliki anak usia 7-18 tahun yang belum menamatkan pendidikan dasar
4. Memiliki ibu hamil/melahirkan/nifas, dan atau
5. Memiliki anak balita
6. Memiliki anak usia 5-7 tahun (anak pra sekolah)

b. Syarat Penetapan Penerima Bantuan PKH

Calon penerima bantuan terpilih wajib menandatangani persetujuan ada formulir validasi untuk mematuhi ketentuan PKH (sesuai yang tercantum dalam pedoman umum) sebagai berikut :

1. Memeriksa kandungan ibu hamil ke fasilitas kesehatan sesuai dengan protokol pelayanan kesehatan dasar
2. Melakukan pemeriksaan pasca persalinan untuk ibu nifas sesuai dengan protokol pelayanan kesehatan dasar

3. Mengantarkan anak usia 0-5 tahun ke fasilitas kesehatan sesuai dengan protokol pelayan kesehatan dasar
4. Mengantarkan anak usia lebih kecil dari 7 tahun yang belum sekolah ke pusat pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
5. Mendaftar dan menyekolahkan anak usia 7 -15 tahun serta anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun.

c. Besaran Bantuan Yang Diterima Peserta PKH

Besaran bantuan yang diterima oleh peserta PKH bervariasi berdasarkan jumlah anggota keluarga yang dihitung menurut ketentuan penerima bantuan, baik komponen kesehatan maupun pendidikan. Besaran bantuan akan bisa berubah di kemudian hari sesuai dengan kondisi keluarga saat itu atau bila peserta PKH tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan. Bantuan terkait kesehatan berlaku bagi peserta PKH dengan anak di bawah 7 tahun dan/atau ibu hamil/nifas. Besar bantuan ini tidak di hitung berdasarkan jumlah anak.

Tabel 2.1 : Skenario Bantuan

Skenario Bantuan	Bantuan per RTSM/KSM/Tahun
Bantuan tetap	Rp. 300.000,00
Bantuan bagi RTSM yang memiliki :	Rp. 1.000.000,00
a. Anak usia dibawah 6 tahun	
b. Ibu hamil/menyusui	
c. Anak peserta pendidikan setara SD/MI	Rp. 500.000,00
d. Anak peserta pendidikan setara SMP/MTs	1.000.000,00
Rata-rata bantuan per RTSM	Rp. 1.800.000,00
Rata-rata minimum per RTSM	Rp. 800.000,00
Bantuan maksimum per RTSM	Rp. 2.800.000,00

Sumber : Buku Panduan Kerja Pendamping PKH Tahun 2013

Apabila anggota peserta PKH melampaui jumlah yang diisyaratkan sebagaimana tabel diatas, maka jumlah bantuan maksimal yang diperoleh adalah Rp. 2.800.000,00 per tahun.

d. Sanksi Bagi Peserta PKH yang Tidak Memenuhi Komitmen

Apabila peserta tidak memenuhi komitmennya, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Pengurangan bantuan adalah 10% setiap bulannya sebelum pembayaran periode berikutnya
2. Peserta tidak akan menerima bantuan jika seluruh anggota tidak memenuhi kewajiban selama 3 bulan berturut-turut. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2 : Sanksi Bagi Peserta PKH

Anggota rumah tangga	Tidak memenuhi komitmen		
	1 bulan	2 bulan	3 bulan
Seluruh	10%	10%	100%
Sebagian /tanggung renteng	10%	10%	10%

e. Mekanisme dan Prosedur

Berdasarkan Buku Pedoman Umum Program Keluarga Harapan Tahun 2010, Program Keluarga Harapan memiliki mekanisme dan prosedur yang terdiri atas kegiatan sebagai berikut :

1. Pemilihan Peserta Program Keluarga Harapan

Target penerima bantuan PKH adalah keluarga sangat miskin (KSM). Penetapan rumah tangga sebagai KSM dilakukan dengan menggunakan metodologi dan indikator transparan. Sebuah rumah tangga dikategorikan sebagai KSM jika rumah tangga tersebut memenuhi indikator kemiskinan.

Indikator kemiskinan dikembangkan dari hasil model estimasi yang menggunakan faktor-faktor yang secara statistik memiliki korelasi dengan kemiskinan multidimensi, seperti antara lain kondisi demografi dan sosio-ekonomi. Indikator-indikator ini lebih lanjut dikembangkan ke dalam kuisioner yang digunakan untuk memverifikasi status kemiskinan rumah tangga. Verifikasi status kemiskinan rumah tangga dilakukan melalui survey terhadap calon peserta. Dalam verifikasi, petugas terdiri atas undur BPS, non BPS dan pengawas.

2. Pertemuan Awal

Tahap awal pelaksanaan PKH dimulai dengan pengiriman pemberitahuan terpilihnya KSM sebagai peserta PKH, yang disertai format perbaikan data KSM, pernyataan persetujuan memenuhi ketentuan PKH, dan undangan untuk menghadiri pertemuan awal oleh PT.POS. Pertemuan awal dikoordinasikan oleh UPPKH Kecamatan dengan mengundang Petugas Puskesmas dan sekolah di Kecamatan tersebut. Tujuan pertemuan awal adalah :

- a. Menginformasikan tujuan dan ketentuan PKH;
- b. Menyerahkan formulir validasi dan pemutakhiran data pada KSM untuk diperbaiki dan ditandatangani oleh KSM sebagai tanda kesediaan mengikuti komitmen yang ditetapkan dalam program;
- c. Menjelaskan komitmen yang perlu dilakukan oleh peserta PKH untuk dapat menerima bantuan;
- d. Menjelaskan sanksi dan implikasi apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen yang ditetapkan dalam program;

- e. Menjelaskan mekanisme dan prosedur keluhan dan pengaduan atas pelaksanaan PKH;
- f. Memfasilitasi pembentukan kelompok ibu peserta PKH, termasuk penunjukan ketua kelompok;
- g. Menjelaskan hak dan kewajiban ibu peserta PKH;
- h. Menerima pengaduan.

3. Pembayaran

Bantuan tunai hanya akan diberikan kepada KSM yang telah terpilih sebagai peserta PKH dan mengikuti ketentuan yang diatur dalam program. Bukti kepesertaannya adalah kepemilikan Kartu PKH yang tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak. Kartu PKH dikirim ke setiap peserta oleh pendamping sebelum pembayaran pertama dilakukan. Pembayaran bantuan dilakukan oleh PT. POS setiap tiga bulan pada tanggal yang ditentukan oleh masing-masing kantor pos untuk masing-masing desa.

f. Pendampingan

Program Keluarga Harapan membutuhkan pendamping agar program ini dapat berjalan dengan efektif, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Sebagian RTSM/KSM mempunyai keterbatasan kemampuan dalam memperjuangkan haknya. Untuk itu dibutuhkan pendampingan, dalam membantu mendapatkan haknya yang patut mereka peroleh dari PKH.
2. Pendamping membantu tugas-tugas UPPKH mendeteksi segala permasalahan dan melakukan tindak lanjut dalam waktu cepat.

Pendamping Program Keluarga Harapan adalah seorang yang direkrut dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI untuk melaksanakan tugas-tugas pendampingan PKH, dan terikat dengan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial, Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial , Kementerian Sosial Republik Indonesia. Untuk memberi jaminan dalam proses kerja di lapangan, Kementerian Sosial mewajibkan setiap pendamping untuk mengasuransikan diri dengan dana yang diberikan.

g. Nilai Etik Yang Menjadi Panutan Bagi Pendamping PKH

Nilai etik dalam pendampingan peserta PKH meliputi :

1. Bersikap sabar
2. Mendengarkan dan tidak mendominasi
3. Menghargai dan rendah hati
4. Mau belajar
5. Bersikap sederajat
6. Bersikap akrab dan melebur
7. Tidak menggurui
8. Berwibawa
9. Tidak memihak, menilai dan mengkritik
10. Bersikap terbuka dan positif

Setiap kecamatan memiliki pendamping yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah peserta PKH yang terdaftar di setiap kecamatan. Sebagai acuan, setiap pendamping akan mendampingi antara 150 s/d 500 RTSM/KSM peserta PKH sesuai dengan kondisi geografis di setiap daerah. Selanjutnya setiap kecamatan

yang memiliki pendamping lebih dari satu orang terdapat koordinator pendamping. Jumlah rasio pendamping dapat berubah sesuai dengan perkembangan yang ada. Lokasi kantor pendamping terletak di UPPKH Kecamatan yang beradadi kantor Camat atau di tempat lain yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Pendamping PKH memiliki beberapa tugas yang meliputi tugas pokok, tugas pengembangan pendampingan PKH dan tugas penunjang.

a. Tugas Pokok meliputi :

Tugas persiapan program yaitu kegiatan yang dilaksanakan sebelum pembayaran pertama diberikan kepada peserta PKH, yang terdiri dari :

- a. Sosialisasi program PKH tingkat kecamatan
- b. Menyelenggarakan peremuan awal dengan seluruh calon peserta PKH
- c. Memperhatikan peserta pertemuan yang bukan calon peserta PKH
- d. Melakukan validasi yaitu proses pengecekan data calon peserta PKH kedalam sistem aplikasi yang telah disiapkan
- e. Membagi dan membentuk kelompok peserta PKH yang beranggotakan 15-30 peserta PKH
- f. Memfasilitasi pemilihan ketua kelompok peserta PKH

b. Tugas Rutin Pendamping PKH

Tugas rutin pendamping PKH adalah tugas keseharian yang harus dilakukan secara intensif. Tugas rutin ini dialokasikan dalam empat hari kerja antara lain hari senin s/d kamis. Tugas rutin pendamping meliputi :

1. Melakukan pemutakhiran data
2. Memfasilitasi dan menyelesaikan kasus pengaduan

3. Mengunjungi rumah peserta PKH yang tidak bisa datang dan tidak memenuhi komitmen
4. Melakukan koordinasi dengan aparat setempat dan pemberi pelayanan pendidikan dan kesehatan
5. Melakukan pertemuan bulanan dengan ketua kelompok dan seluruh peserta PKH
6. Melakukan temu kunjung bulanan dengan petugas kesehatan dan pendidikan di lokasi pelayanan
7. Memberikan motivasi kepada peserta PKH dalam menjalankan komitmen
8. Melakukan upaya yang sinergis antara pendamping PKH dengan pemberi pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam pengisian formulir verifikasi
9. Melakukan pencatatan dan pelaporan.

c. Tugas Pengembangan Pendamping PKH

Tugas pengembangan yang dilakukan pendamping PKH meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi atau kerjasama dengan tokoh-tokoh adat atau keagamaan dalam sesi-sesi komunikasi ritual
2. Melakukan kerjasama dengan tim penggerak PKK
3. Menumbuhkan semangat keirausahaan keluarga peserta PKH melalui usaha ekonomi produktif
4. Memotivasi dan advokasi anggota keluarga PKH yang mengalami disabilitas
5. Memfasilitasi ketersediaan media konsultasi bagi keluarga peserta PKH yang mengalami ketidak-harmonisan

6. Menggugah kesadaran keluarga peserta PKH tentang pentingnya menjaga lingkungan
7. Mengidentifikasi potensi dan sumber daya yang ada di wilayah kerja pendamping
8. Pendamping dapat bersinergi dengan program kelompok usaha bersama
9. Berperan serta dalam menunjang sosialisasi program keluarga berencana.

d. Tugas Penunjang Pendamping PKH

Tugas penunjang pendamping PKH meliputi :

1. Mengembangkan kapasitas diri dalam berkomunikasi, bernegosiasi, membangun relasi dan jejaring kerja
2. Mendokumentasikan setiap kegiatan penting terkait tugas dan fungsi sebagai pendamping PKH
3. Melatih diri dalam kegiatan tulis menulis berkaitan dengan pengalaman selama mendampingi peserta PKH sebagai testimoni.

Berdasarkan uraian mengenai Program Keluarga Harapan yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa PKH merupakan program dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan mengurangi tingkat kemiskinan melalui peningkatan fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan bagi Rumah Tangga Sangat Miskin atau Keluarga Sangat Miskin. Dalam pelaksanaannya di lapangan, program ini dibantu oleh seorang pendamping, yang bertugas untuk membantu peserta PKH dalam mendapatkan haknya yang patut mereka peroleh dari PKH dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menyangkut PKH.

Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Tanjung Kesuma, selama kurang lebih dua tahun ini berjalan cukup lancar dan cukup berhasil. Melalui penelitian pendahuluan yang saya lakukan di desa tersebut, indikator keberhasilan Program Keluarga Harapan yang akan saya gunakan yaitu, tepat sasaran, efisiensi, dan ketercapaian tujuan, secara rinci akan diuraikan sebagai berikut :

a. Tepat sasaran

Tepat sasaran atau dengan kata lain ketepatan program merupakan keadaan dimana tujuan program atau hasil yang di harapkan sesuai dengan prioritas pemerintah atau kebutuhan masyarakat (Suharto, 2013:47). Hal ini terlihat dari penerima bantuan Program Keluarga Harapan yang ada di Desa Tanjung Kesuma sebagian besar sudah tepat sasaran, karena pendataan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan data penerima bantuan-bantuan sosial lainnya, jadi masyarakat yang sudah memenuhi kriteria penerima bantuan Program Keluarga Harapan sangat di prioritaskan.

b. Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu keadaan dimana input yang sekecil-kecinya dapat menghasilkan output yang sebesar-besarnya, dengan kata lain menghitung seberapa besar barang dan jasa mampu di hasilkan sesuai dengan sumber daya yang dikeluarkan (Suharto, 2013:42). Efisiensi (*efficiency*) juga berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya di ukur dari ongkos moneter. Efisiensi yang terlihat saat melakukan penelitian pendahuluan di Desa Tanjung Kesuma, keterlaksanaan Program Keluarga Harapan ini cukup

efisien, hal ini terlihat dari prosedurnya yang terperinci secara jelas dan peran serta pendamping yang senantiasa memberikan informasi dan pengarahan kepada penerima bantuan Program Keluarga Harapan dalam pertemuan rutin bulanan, sehingga memudahkan para penerima bantuan Program Keluarga Harapan ini dalam menjalankan prosedur-prosedur yang ada dalam Program Keluarga Harapan.

c. Ketercapaian Tujuan

Ketercapaian tujuan merupakan suatu keadaan dimana tujuan-tujuan awal (apa yang ingin dicapai) yang telah ditetapkan oleh suatu program dapat tercapai dengan baik. Tujuan-tujuan pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Tanjung Kesuma yang sudah memasuki tahun kedua ini, dapat tercapai dengan baik, hal ini tentunya tidak lepas dari peran serta dan dukungan dari penerima bantuan Program Keluarga Harapan, pendamping Program Keluarga Harapan, dan instansi-instansi yang terkait.

Dalam penelitian implementasi Program Keluarga Harapan ini ingin melihat bagaimana hubungan implementasi PKH dengan tingkat pendidikan di Desa Tanjung Kesuma, dengan menggunakan indikator tingkat pendidikan dasar, tingkat pendidikan menengah, dan tingkat pendidikan tinggi. Tingkat pendidikan di desa Tanjung Kesuma selama dua tahun terakhir mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari jumlah lulusan SD, SMP, dan SMA yang terus meningkat berdasarkan data penduduk di desa tersebut.

4. Pendidikan

Pendidikan merupakan sesuatu yang mutlak harus dipenuhi sebagai pengalaman belajar yang baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi dasar dalam perubahan tingkah laku menuju kedewasaan. Pendidikan diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga seseorang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan (Muhibinsyah, 2003 dalam irianto 2011). Pemerintah Indonesia selalu berusaha untuk meningkatkan sumber daya manusia yang unggul agar dapat bersaing pada era globalisasi ini. Salah satunya yaitu melalui pendidikan. Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa “Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman”. Hal ini dipertegas kembali dalam Bab II mengenai dasar, fungsi, dan tujuan yang tercantum pada Pasal 2 ayat 3 disebutkan bahwa :

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab”.

Berdasarkan landasan hukum yang telah disebutkan diatas, maka pemerintah mencanangkan program wajib belajar untuk meningkatkan taraf pendidikan dan tingkat kesejahteraan di Indonesia. Program wajib belajar ini diselenggarakan oleh

pemerintah Indonesia atas dasar peraturan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 18 yang berbunyi “Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah”. Wajib belajar sendiri terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

5. Tingkat Pendidikan

Tingginya rata-rata tingkat pendidikan masyarakat sangat penting bagi kesiapan bangsa dalam menghadapi tantangan global di masa depan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang atau masyarakat untuk menyerap informasi dan mengimplementasikannya dalam perilaku sehari-hari. Berdasarkan Pasal 1 ayat 8 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 disebutkan bahwa “Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan”. Umumnya pendidikan formal di Indonesia terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

a. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat (Undang-undang Sisdiknas No.20 Tahun 2003 Pasal 17). Hal ini dijelaskan

kembali dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar yang tertuang dalam pasal 1 ayat (3) s/d (6) yang berbunyi :

Ayat (3) Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

Ayat (4) Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, di dalam pembinaan Menteri Agama.

Ayat (5) Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.

Ayat (6) Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat, di dalam pembinaan Menteri Agama.

b. Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat. Pada jenjang pendidikan menengah mengutamakan pengembangan kemampuan masyarakat untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu (Undang-undang Sisdiknas No.20 Tahun 2003 Pasal 18).

c. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka (Undang-undang Sisdiknas No.20 Tahun 2003 Pasal 19).

Pasal 34 ayat (1) PP Nomor 30 Tahun 1990 disebutkan bahwa perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi dan penelitian serta pengabdian pada masyarakat. Di dalam penyelenggaraanya, pendidikan tinggi memiliki tujuan (Pasal 2 ayat 1) :

1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian;
2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Menurut Sudiyono (2004), untuk mencapai tujuan tersebut harus memenuhi rambu-rambu yaitu harus berdasarkan pada kaidah, moral dan etika ilmu pengetahuan, kepentingan masyarakat, serta memperhatikan minat, kemampuan, dan prakarsa pribadi. Telah disebutkan bahwa perguruan tinggi berfungsi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Fungsi perguruan tinggi adalah menyelenggarakan pendidikan dalam upaya

menghasilkan manusia yang terdidik sesuai dengan tujuan pendidikan tinggi. Fungsi penelitian dalam Pasal 3 Ayat (3) PP Nomor 30 Tahun 1990 disebutkan bahwa penelitian merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model atau informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian. Sedangkan fungsi pengabdian pada masyarakat dalam Ayat (4) Pasal 3 peraturan tersebut disebutkan bahwa pengabdian pada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.

Dalam Pasal 4 Ayat (1) disebutkan bahwa pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan profesional. Ayat (1) Pasal ini menyebutkan bahwa pendidikan akademik mengutamakan peningkatan mutu dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan dan diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut dan universitas. Sementara pada Pasal 4 Ayat (3) disebutkan bahwa pendidikan profesional mengutamakan peningkatan kemampuan menerapkan ilmu pengetahuan yang diselenggarakan oleh sekolah tinggi, politeknik, institut, dan universitas. Dalam Pasal 6 Ayat (11) disebutkan bahwa perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas. Sementara itu administrasi akademik perguruan tinggi diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).

Berdasarkan uraian mengenai tingkat pendidikan, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan sangat berpengaruh bagi kemajuan suatu masyarakat. Tingkat pendidikan akhir yang ditempuh oleh seseorang berpengaruh terhadap pola pikir dan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah yang di hadapi dalam kehidupan sehari-hari.

6. Teori Belajar Humanisme

Dalam teori humanisme lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Pendekatan ini melihat kejadian yaitu bagaimana dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Kemampuan positif ini yang disebut sebagai potensi manusia, dan para pendidik yang beraliran humanisme biasanya memfokuskan pengajarannya pada pembangunan kemampuan yang positif. Kemampuan positif tersebut erat kaitannya dengan pengembangan emosi positif yang terdapat dalam domain afektif. Dalam teori pembelajaran humanistik, belajar merupakan proses yang dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia. Dimana memanusiakan manusia di sini berarti mempunyai tujuan untuk mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang yang belajar secara optimal.

Beberapa psikolog humanistik melihat bahwa manusia mempunyai keinginan alami untuk berkembang, untuk lebih baik, dan juga belajar. Secara singkatnya, pendekatan humanistik dalam pendidikan menekankan pada perkembangan positif. Pendekatan yang berfokus pada potensi manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan yang mereka punya dan mengembangkan kemampuan tersebut. Hal ini mencakup kemampuan interpersonal sosial dan metode untuk pengembangan diri yang ditujukan untuk memperkaya diri, menikmati keberadaan hidup dan juga masyarakat. Keterampilan atau kemampuan membangun diri secara positif ini menjadi sangat penting dalam pendidikan karena keterkaitannya dengan keberhasilan akademik.

a. Ciri -ciri Teori Belajar Humanisme

Aliran humanisme memandang belajar sebagai sebuah proses yang terjadi dalam individu yang meliputi bagian/domain yang ada yaitu dapat meliputi domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dengan kata lain, pendekatan humanisme menekankan pentingnya emosi atau perasaan, komunikasi terbuka, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh setiap siswa. Untuk itu, metode pembelajaran humanistik mengarah pada upaya untuk mengasah nilai-nilai kemanusiaan siswa. Sehingga para pendidik/guru diharapkan dalam pembelajaran lebih menekankan nilai-nilai kerjasama, saling membantu, dan menguntungkan, kejujuran dan kreativitas untuk diaplikasikan dalam proses pembelajaran sehingga menghasilkan suatu proses pembelajaran yang diharapkan sesuai dengan tujuan dan hasil belajar yang dicapai siswa.

b. Tokoh-tokoh Teori Belajar Humanistik

1. Carl Ransom Rogers

Carl Ransom Rogers (1902-1987) lahir di Oak Park, Illinois pada tanggal 8 Januari 1902. Teori humanisme Rogers lebih penuh harapan dan optimis tentang manusia karena manusia mempunyai potensi-potensi yang sehat untuk maju. Dasar teori ini sesuai dengan pengertian humanisme pada umumnya, dimana humanisme adalah doktrin, sikap, dan cara hidup yang menempatkan nilai-nilai manusia sebagai pusat dan menekankan pada kehormatan, harga diri, dan kapasitas untuk merealisasikan diri untuk maksud tertentu. Ada beberapa Asumsi dasar teori Rogers adalah: kecenderungan formatif; segala hal di dunia baik organik maupun non-organik tersusun dari hal-hal yang lebih kecil; Kecenderungan aktualisasi; Kecenderungan setiap makhluk hidup untuk

bergerak menuju ke kesempurnaan atau pemenuhan potensial dirinya. Tiap individual mempunyai kekuatan yang kreatif untuk menyelesaikan masalahnya.

2. Abraham Maslow

Teori Maslow didasarkan pada asumsi bahwa di dalam diri individu ada dua hal yaitu :

- (1) suatu usaha yang positif untuk berkembang
- (2) kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu.

Maslow mengemukakan bahwa individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hirarkis. Pada diri masing-masing orang mempunyai berbagai perasaan takut seperti rasa takut untuk berusaha atau berkembang, takut untuk mengambil kesempatan, takut membahayakan apa yang sudah ia miliki dan sebagainya, tetapi di sisi lain seseorang juga memiliki dorongan untuk lebih maju ke arah keutuhan, keunikan diri, ke arah berfungsinya semua kemampuan, ke arah kepercayaan diri menghadapi dunia luar dan pada saat itu juga ia dapat menerima diri sendiri (self).

Maslow membagi kebutuhan-kebutuhan (needs) manusia menjadi tujuh hirarki. Bila seseorang telah dapat memenuhi kebutuhan pertama, seperti kebutuhan fisiologis (udara, makanan, air, tidur), barulah ia dapat menginginkan kebutuhan yang terletak di atasnya, ialah kebutuhan mendapatkan rasa aman / *safety needs* (lapangan kerja, kesehatan), kebutuhan untuk dimiliki dan dicintai / *belongingness needs* (keluarga, persahabatan, cinta), kebutuhan akan harga diri / *esteem needs* (harga diri, kepercayaan diri) dan kebutuhan aktualisasi diri / *self actualization needs* (moralitas, kreativitas).

3. Arthur Combs

Combs berpendapat bahwa persepsi merupakan unsur batinah yang menyebabkan seseorang berbeda dengan yang lain. Kaitannya dengan pembelajaran, guru berusaha untuk memahami sudut pandang peserta didik terhadap suatu hal. Perilaku yang keliru atau tidak baik terjadi karena tidak adanya kesediaan seseorang untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan karena adanya faktor lain. Combs memberikan lukisan persepsi diri dan dunia seseorang seperti dua lingkaran (besar dan kecil) yang bertitik pusat pada satu yaitu lingkaran kecil dan lingkaran besar.

Dalam Teori Belajar Humanistik, belajar merupakan proses yang dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia, yakni untuk mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang yang belajar secara optimal. Salah satu ide penting dalam teori belajar humanistik adalah siswa harus mempunyai kemampuan untuk mengarahkan sendiri perilakunya dalam belajar (self regulatif learning), apa yang akan dipelajari dan sampai tingkatan mana, kapan dan bagaimana mereka akan belajar.

Konsep teori belajar humanisme ini ada hubungannya dengan implementasi Program Keluarga Harapan yang ada dalam penelitian ini. Pada dasarnya teori belajar humanisme menekankan pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Beberapa psikolog humanistik melihat bahwa manusia mempunyai keinginan alami untuk berkembang, untuk lebih baik, dan juga belajar. Secara singkatnya, pendekatan humanistik dalam pendidikan menekankan pada perkembangan positif. Pendekatan yang berfokus pada potensi manusia untuk mencari dan

menemukan kemampuan yang mereka punya dan mengembangkan kemampuan tersebut. Untuk memenuhi keinginan manusia yang selalu ingin berkembang, untuk lebih baik, dan juga belajar untuk mendapatkan kehidupan yang layak serta mengaktualisasikan diri, maka pemerintah membuat Program Keluarga Harapan yang juga memfokuskan pada bidang pendidikan. Sehingga diharapkan melalui pendidikan, manusia dapat mengembangkan kemampuannya.

B. Kajian Penelitian Yang Relevan

1. Tingkat Lokal

Kharoling Dwita Permata (Skripsi, 2013) dengan judul “Evaluasi Program Keluarga Harapan di Kawasan Pesisir Bandar Lampung : (Studi kasus di Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung)”. Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas tentang evaluasi mengenai Program Keluarga Harapan di kawasan pesisir Bandar Lampung, dengan menggunakan kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn (2003:609-611) yaitu : Efektifitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan, kemudian indikator yang digunakan peneliti dalam mengevaluasi Program Keluarga Harapan ada dua yaitu, berhasilnya PKH dan tidak berhasilnya PKH. Tipe dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui dan menganalisis evaluasi kebijakan PKH.

Prosedur penelitiannya bersifat menjelaskan, menggambarkan, dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata atau kalimat sebagai

jawaban atas permasalahan yang diteliti, kemudian untuk objek penelitiannya adalah menggambarkan bagaimana evaluasi kebijakan dari penerapan PKH. Hasil dalam penelitian ini adalah : (1) PKH telah efektif karena telah mencapai tujuannya yaitu membantu keluarga sangat miskin untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan keluarganya. (2). PKH sudah efisien karena sesuai dengan prosedur dalam pemberian bantuan, sehingga program ini memiliki kejelasan indikator penerima bantuan dan dampaknya terhadap pelanggaran aturan tersebut. (3). PKH belum memenuhi kriteria responsivitas dikarenakan bantuan ini belum cukup memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan yang mahal. (4). PKH sudah memenuhi kriteria ketepatan dimana dalam pemberian bantuan PKH dilakukan secara selektif yaitu hanya keluarga KSM yang telah memenuhi kriteria PKH yang memperoleh bantuan.

2. Tingkat Nasional

- a. Penelitian oleh Ajeng Kusuma Dewanti (Skripsi, Tahun 2012) FISIP UNY dengan judul “Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunung Kidul”
- b. Penelitian oleh Nurfahira Syamsir (Skripsi, tahun 2014) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, dengan judul penelitian “Implementasi Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan di Kecamatan Temalate Kota Makassar Tahun 2014”

Alasan saya menggunakan penelitian milik Kharoling Dwita Permata sebagai kajian penelitian yang relevan dikarenakan dalam penelitian saya juga membahas Program Keluarga Harapan, perbedaannya adalah jika dalam penelitian saudara Kharoling Dwita Permata membahas mengenai evaluasi penerapan Program

Keluarga Harapan, sedangkan dalam penelitian yang akan saya lakukan adalah membahas tentang hubungan implementasi Program Keluarga Harapan dengan tingkat pendidikan di Desa Tanjung Kesuma Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur. Indikator yang akan saya gunakan untuk mengetahui bagaimana implementasi PKH di Desa Tanjung Kesuma adalah tepat sasaran, efisiensi dan ketercapaian tujuan, kemudian saya menggunakan indikator tingkat pendidikan dasar, tingkat pendidikan menengah, dan tingkat pendidikan tinggi, untuk mengetahui tingkat pendidikan di Desa Tanjung Kesuma setelah adanya Program Keluarga Harapan.

C. Kerangka Pikir

Program Keluarga Harapan merupakan program yang berada di bawah kendali Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial. Program ini dilaksanakan sesuai dengan keputusan Direktorat Bantuan dan Jaminan Sosial No.27/BJS-BS.08.04/11/2010 tentang Pedoman Umum Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan adalah program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin/Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM), tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mengubah pandangan, sikap, serta perilaku RTSM/KSM untuk lebih dapat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan. Dalam usaha pencapaian suatu implementasi kebijakan terdapat faktor-faktor yang turut berpengaruh berdasarkan variabel-variabel yang terkait dengan implementasi kebijakan (variabel X), namun yang akan saya gunakan sebagai indikator dalam penelitian ini adalah tepat sasaran, efisiensi, dan ketercapaian tujuan, sedangkan untuk tingkat pendidikan (variabel

Y) indikator yang akan saya gunakan adalah tingkat pendidikan dasar, tingkat pendidikan menengah, dan tingkat pendidikan tinggi, karena beberapa indikator inilah yang ditemukan saat melakukan penelitian pendahuluan. Secara rinci, beberapa indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tepat Sasaran

Tepat sasaran atau dengan kata lain ketepatan program merupakan keadaan dimana tujuan program atau hasil yang di harapkan sesuai dengan prioritas pemerintah atau kebutuhan masyarakat.

b. Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu keadaan dimana input yang sekecil-kecinya dapat menghasilkan output yang sebesar-besarnya, dengan kata lain menghitung seberapa besar barang dan jasa mampu di hasilkan sesuai dengan sumber daya yang dikeluarkan

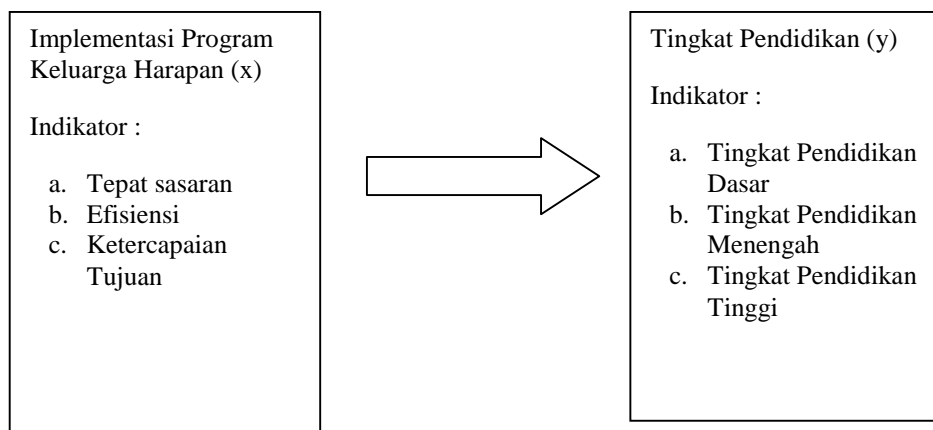
c. Ketercapaian Tujuan

Ketercapaian tujuan merupakan suatu keadaan dimana tujuan-tujuan awal (apa yang ingin dicapai) yang telah ditetapkan oleh suatu program dapat tercapai dengan baik.

Indikator yang digunakan untuk tingkat pendidikan di Desa Tanjung Kesuma yaitu tingkat pendidikan dasar, tingkat pendidikan menengah, dan tingkat pendidikan tinggi. Indikator pendidikan dasar, yaitu jumlah warga yang menempuh program wajib belajar 9 tahun (SD hingga SMP) meningkat, indikator pendidikan menengah, yaitu jumlah warga yang menempuh pendidikan

SMA/SMK meningkat, dan indikator pendidikan tinggi yaitu jumlah warga yang menempuh pendidikan tinggi (universitas, akademi/ sederajat) meningkat.

Dari uraian di atas tentang Hubungan Implementasi Program Keluarga Harapan Dinas Sosial dengan Tingkat Pendidikan di Desa Tanjung Kesuma Kecamatan Purbolingo Kabupaten Lampung Timur ini merupakan hal yang berpengaruh penting dalam kehidupan bermasyarakat. Secara sistematis kerangka pikir dalam penelitian ini dapat disajikan dalam bentuk bagan sebagai berikut :



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana hubungan implementasi Program Keluarga Harapan Dinas Sosial dengan tingkat pendidikan, sesuai dengan tujuan tersebut, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif verifikatif dengan jenis penelitian asosiatif. Menurut Nawawi (2003), “penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya”. Sedangkan verifikatif menunjukkan peneliti mencari pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Berdasarkan jenis data yang dianalisis, penelitian ini tergolong dalam penelitian kuantitatif, yaitu “penelitian yang datanya berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan” (Sugiono, 2005:13).

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya” (Sugiono, 2010: 117). Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Tanjung Kesuma yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan yang berjumlah 33 orang yang tersebar di enam Dusun. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 : Daftar Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Tanjung Kesuma

No	Nama Kelompok Warga	Jumlah Penerima PKH
1.	Dusun I	4 orang
2.	Dusun II	-
3.	Dusun III	8 orang
4.	Dusun IV	5 orang
5.	Dusun V	12 orang
6.	Dusun VI	4 orang
Jumlah		33 orang

Sumber : Data Administratif Penerima PKH Desa Tanjung Kesuma

Berdasarkan tabel diatas maka dalam penelitian ini populasi yang ditetapkan adalah sebanyak 33 orang.

2. Sampel

Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 107), “apabila subjek kurang dari 100 lebih baik di ambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika jumlah subjeknya lebih dari 100 dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih”.

Berdasarkan pendapat diatas, karena populasi dalam penelitian ini kurang dari seratus, maka sampel yang diambil sebanyak 100% yaitu 33 orang yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Tanjung Kesuma.

C. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen). “Variabel bebas adalah variabel yang

mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas” (Sugiyono, 2005). Yang menjadi variabel bebas pada penelitian ini implementasi Program Keluarga Harapan (X), sedangkan variabel terikat (Y) adalah tingkat pendidikan.

D. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional Variabel

1. Definisi Konseptual

Menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi (2001: 21), definisi konsep adalah pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti untuk mengoperasikan konsep tersebut kelapangan. Berdasarkan definisi tersebut maka definisi konsep penelitian ini adalah :

a. Implementasi Program Keluarga Harapan

Dalam penelitian ini akan membahas mengenai hubungan implementasi Program Keluarga Harapan dengan tingkat pendidikan di Desa Tanjung Kesuma. Penerapan Program Keluarga Harapan merupakan program yang berada di bawah kendali Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial.

Program Keluarga Harapan adalah program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin/Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM), tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mengubah pandangan, sikap, serta perilaku RTSM/KSM untuk lebih dapat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan. Program Keluarga

Harapan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peserta dalam memperbaiki kondisi kesehatan, pendidikan, pangan, dan gizi serta dapat menghilangkan kesenjangan sosial yang melekat pada masyarakat miskin, sehingga bisa meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, pangan dan gizi dari masyarakat.

b. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Tingginya rata-rata tingkat pendidikan masyarakat sangat penting bagi kesiapan bangsa dalam menghadapi tantangan global di masa depan. Umumnya pendidikan formal di Indonesia terdiri atas :

1. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.

2. Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.

3. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.

2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operational variabel berarti mendefinisikan secara operational suatu konsep sehingga dapat diukur, dicapai dengan melihat pada dimensi tingkah laku atau properti yang ditunjukkan oleh konsep dan mengkategorikan hal tersebut menjadi elemen yang dapat diukur (Basrowi dan Kasinu, 2007: 179). Berdasarkan definisi diatas, definisi operational dalam penelitian ini adalah :

a. Implementasi Program Keluarga Harapan

Implementasi Program Keluarga Harapan adalah Penerapan Program Keluarga Harapan yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin/Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM), tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mengubah pandangan, sikap, serta perilaku RTSM/KSM untuk lebih dapat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan. Dalam penelitian ini untuk mengukur Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Tanjung Kesuma dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :

- a. Tepat sasaran
- b. Efisiensi
- c. Ketercapaian tujuan

b. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Dalam penelitian ini, untuk mengukur tingkat pendidikan di Desa Tanjung Kesuma dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :

- a. Tingkat Pendidikan Dasar
- b. Tingkat pendidikan Menengah
- c. Tingkat Pendidikan Tinggi

E. Rencana Pengumpulan Variabel

1. Variabel bebas

Untuk memperoleh data tentang hubungan implementasi Program Keluarga Harapan dengan tingkat pendidikan di Desa Tanjung Kesuma akan dilakukan dengan menyebarkan angket, yang di ukur dalam variabel ini adalah tingkat keberhasilan Program Keluarga di Desa Tanjung Kesuma. Adapun ukurannya adalah sebagai berikut :

- a. Berhasil
- b. Kurang berhasil
- c. Tidak berhasil

Setiap item soal memiliki 3 alternatif jawaban yang masing-masing terdiri dari a, b, dan c, sehingga responden tinggal memilih salah satu jawaban yang tersedia.

Adapun dengan pemberian skornya dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Memilih alternatif A diberi skor 3
- b. Memilih alternatif B diberi skor 2

- c. Memilih alternatif C diberi skor 1

2. Variabel Terikat

Yang berkedudukan sebagai variabel terikat adalah tingkat pendidikan di Desa Tanjung Kesuma. Tingkat pendidikan dapat dilihat dan diukur dengan menggunakan data tingkat pendidikan masyarakat hingga tahun 2015. Kriteria ukuran dari tingkat pendidikan ini adalah dengan skala interval yang meliputi :

- a. Tingkat pendidikan tinggi
- b. Tingkat pendidikan sedang
- c. Tingkat pendidikan rendah

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis akan menggunakan data sebagai berikut:

1. Teknik Pokok

a. Metode Angket

Teknik pokok dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik angket, yaitu dengan cara membuat sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden dengan maksud untuk menjangkau data dan informasi langsung dari responden yang bersangkutan. Sasaran angket atau responden dalam penelitian ini adalah penerima bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Tanjung Kesuma Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur.

Angket dalam penelitian ini digunakan dalam rangka mendapatkan data yang diperlukan yaitu angka-angka yang berupa skor atau nilai-nilai dan kemudian

data di analisis. Angket digunakan menyebar pertanyaan kepada responden berbentuk soal pilihan ganda, setiap item soal memiliki 3 alternatif jawaban yang masing-masing terdiri dari a, b, dan c, sehingga responden tinggal memilih salah satu jawaban yang tersedia. Adapun dengan pemberian nilainya dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk jawaban yang sesuai dengan harapan diberi skor 3
2. Untuk jawaban yang mendekati dengan harapan diberi skor 2
3. Untuk jawaban yang jauh dari harapan diberi skor 1

Berdasarkan hal di atas maka dapat diketahui nilai tertinggi adalah tiga (3) dan nilai terendah adalah satu (1).

2. Teknik Penunjang

a. Observasi

Teknik pengamatan atau observasi dapat dilakukan terhadap objek, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini pelaksanaan pengamatan menempuh dengan cara pengamatan langsung pengamatan langsung dilakukan tanpa perantara.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab, baik secara langsung dan tidak langsung dengan sumber data. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung yaitu dengan cara mewawancarai ketua dan anggota kelompok penerima bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Tanjung Kesuma.

G. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

1. Uji Validitas

Menurut Arikunto (2006:168) “validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen”. Uji validitas diadakan melalui kontrol langsung terhadap teori-teori yang melahirkan indikator-indikator variabel yang disesuaikan dengan maksud dan isi butir soal yang dilakukan melalui koreksi angket.

Dalam penelitian ini validitas yang digunakan adalah logical validity, yaitu dengan mengkonsultasikan dengan dosen pembimbing, berdasarkan konsultasi tersebut dilakukan perbaikan.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas (*reliability*) berhubungan dengan konsistensi. Suatu instrumen disebut *reliable* apabila instrumen tersebut konsisten dalam memberikan penilaian atas apa yang dapat diukur. Menurut Suharsini Arikunto (1998:151) “untuk membuktikan pemantapan alat pengumpulan data akan diadakan uji coba angket, reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen dapat dipercaya dapat dipergunakan sebagai alat pengumpulan data instrumen tersebut sudah baik.

Untuk mengetahui apakah suatu alat ukur dapat dipakai atau tidak maka diadakan suatu uji coba angket dengan teknik belah dua dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyebarkan angket uji coba kepada 10 orang diluar responden.
2. Untuk menguji reliabilitas soal angket digunakan teknik belah dua atau ganjil genap.

3. Kemudian mengkorelasi kelompok ganjil dan genap dengan korelasi *Product Moment*, yaitu:

$$R_{xy} = \frac{\sum xy - \frac{(\sum x)(\sum y)}{N}}{\sqrt{\left\{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{N}\right\}\left\{\sum y^2 - \frac{(\sum y)^2}{N}\right\}}}$$

Keterangan:

r_{xy} = hubungan variabel X dan Y

X = Variabel bebas

Y = Variabel terikat

N = jumlah responden

(Sutrisno Hadi, 1989: 318)

4. Kemudian dicari reliabilitasnya dengan menggunakan rumus *Spearman Brown* (Sutrisno Hadi, 2008: 37) agar diketahui koefisien seluruh item yaitu:

$$r_{xy} = \frac{2(r_{gg})}{1+r_{gg}}$$

Keterangan:

r_{xy} = koefisien reliabilitas seluruh tes

r_{gg} = koefisien korolasi item ganjil genap

(Sutrisno Hadi, 1989: 37)

5. Hasil kemudian dibandingkan dengan tingkat reliabilitas dengan kriteria sebagai berikut :

0,90-1,00 = reliabilitas tinggi

0,50-0,89 =reliabilitas sedang

0,00-0,49 = reliabilitas rendah

H. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan setelah data terkumpul yaitu dengan mengidentifikasi data, penyeleksi dan selanjutnya klasifikasi data kemudian menyusun data. Adapun tekniknya sebagai berikut:

Untuk mengolah dan menganalisis data, akan digunakan rumus:

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Keterangan:

I = Interval

NT = Nilai Tertinggi

NR = Nilai Rendah

K = Kategori

(Sutrisno Hadi, 1986:12)

Setelah itu maka dikelompokkan menggunakan rumus persentase sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi (1998:39) yaitu:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Dimana :

P = Persentase

F = Frekuensi pada klasifikasi atau kategori variasi

N = Jumlah frekuensi dari seluruh klasifikasi atau kategori variasi

Untuk menafsirkan banyaknya persentase (Suharsimi Arikunto, 1998:196)

yang diperoleh digunakan kriteria sebagai berikut :

76% - 100% = Baik

56% - 76% = Cukup Baik

40% - 55% = Kurang Baik

Pengujian keeratan hubungan dilakukan dengan menggunakan rumus

ChiKuadrat, sebagai berikut:

$$X^2 = \sum_{i=1}^b \sum_{j=1}^k \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

Keterangan:

X^2 : Chi Kuadrat

O_{ij} : Banyaknya data yang diharapkan terjadi

$\sum_{j=1}^k$: Jumlah kolom

$\sum_{i=1}^b$: Jumlah baris

E_{ij} : Banyaknya data hasil pengamatan

(Sudjana, 1996: 280) .

Kriteria uji sebagian berikut:

- a. Jika X^2 hitung lebih besar atau sama dengan X^2 tabel dengan taraf signifikan 5% maka hipotesis diterima
- b. Jika X^2 hitung lebih kecil atau sama dengan X^2 tabel dengan taraf signifikan 5% maka hipotesis ditolak

Selanjutnya data akan diuji dengan menggunakan rumus koefisien kontingen, Sudjana (1996: 280), hal ini dilakukan untuk mengetahui hubungan implementasi Program Keluarga Harapan dengan tingkat pendidikan, yaitu:

$$C = \sqrt{\frac{X^2}{X^2 + n}}$$

Keterangan:

C : Koefisien Kontingensi

X^2 : Chi Kuadrat

N : Jumlah sampel

Agar harga C yang diperoleh dapat digunakan untuk menilai derajat asosiasi faktor-faktor, maka harga C dibandingkan dengan koefisien kontingensi maksimum. Sutrisno Hadi (1989: 317), harga C maksimum dapat dihitung, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$C_{\text{maks}} = \sqrt{\frac{m-1}{m}}$$

Keterangan :

C_{maks} : Koefisien kontingen maksimum

M : Harga minimum antara banyak baris dan kolom dengan kriteria uji pengaruh makin dekat dengan harga C_{maks} makin besar derajat asosiasi antar faktor.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat hubungan antara implementasi Program Keluarga Harapan Dinas Sosial dengan peningkatan tingkat pendidikan di Desa Tanjung Kesuma Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur. Pengujian hipotesis menunjukkan hasil 0,80 dalam kategori sangat erat. Hal ini dapat dilihat dari tujuan yang telah dicapai oleh Program Keluarga Harapan ini yaitu meningkatkan taraf pendidikan bagi anak-anak Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) khususnya pendidikan dasar wajib belajar 9 tahun. Peningkatan taraf pendidikan ini dapat ditunjukkan dengan adanya anak-anak dari Rumah Tangga Sangat Miskin yang sudah mengenyam pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar serta dapat melanjutkan pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar ke tingkat Sekolah Menengah Pertama, selain itu anak-anak dari RTSM juga memiliki tingkat kehadiran yang baik saat disekolah.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka peneliti dapat mengajukan saran sebagai berikut :

Agar implementasi Program Keluarga Harapan dapat terlaksana dengan baik, maka hendaknya diperlukan dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya yang masih menjadi hambatan yaitu, para penerima bantuan Program Keluarga Harapan masih kurang menyadari kewajibannya sebagai peserta PKH, beberapa dari mereka ada yang tidak hadir dalam pertemuan rutin bulanan. Untuk mengatasi hal ini, hendaknya kepada penerima harus paham akan kewajibannya sebagai peserta PKH dan dapat menerima sanksi jika tidak memenuhi kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Bina Aksara.
- Anggota IKAPI. 2013. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan : Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*. Bandung. Fokus Media.
- Baedhowi. 2009. *Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan: Konsep Dasar Dan Implementasi*. Semarang: Pelita Insani.
- Direktorat Jaminan Sosial. 2013. *Buku Kerja Pendamping PKH*. Jakarta . Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI.
- Hadi, Sutrisno.1981. *Statistik jilid 1*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM.
- Hadi, Sutrisno. 1986. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM.
- Irianto, Yoyon Bahtiar. 2011. *Kebijakan Pembaruan Pendidikan (Konsep, Teori, Dan Model)*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Koestoro, Budi dan Basrowi. 2006. *Strategi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Surabaya: Yayasan Kampusina.
- Karwono & Mularsih, Heni. 2010. *Belajar dan Pembelajaran Serta Pemanfaatan Sumber Belajar*. Ciputat: Cerdas Jaya.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2003. *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Reflika Aditama.
- Midgley, James. 2005. *Pembangunan Sosial, Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.

- Nawawi. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Permata , KD. 2013. *Evaluasi Program Keluarga Harapan di Kawasan Pesisir Bandar Lampung (Studi Kasus di Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung)*. Skripsi, Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Lampung. Universitas Lampung.
- Singaribuan, Masri Dan Effendi, Sofyan. 1989. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3Es.
- Sudiyono. 2004. *Manajemen Pendidikan Tinggi*. Yogyakarta : Rineka Cipta
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2007. *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*. Bandung: Refika Aditama.
- Suharto, Edi. 2013. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Surakhmad, Winarno. 1982. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Suud, Mohammad. 2006. *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial*. Jakarta : Prestasi Pustaka
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan, Model-Model Implementasi, Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. CAPS (Center of Academic Publishing Service) : Yogyakarta.